

# Belajar Berpolitik di Sekolah? Kenapa Tidak?

Eko Hadi Purnomo

E-mail: ignatiusekohadipurnomo@yahoo.co.id

SMPK Nasional Plus BPK PENABUR Bogor

**Pendahuluan**

Tidak ada yang bisa menampik bahwa manusia menjalani kehidupannya dalam dua status sekaligus, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Namun, masih ada status ketiga yang juga disandang oleh setiap manusia, yaitu makhluk politik. Kalau kata Aristoteles, sang penemu status, manusia adalah *zoon politicon*. Mengapa Aristoteles menyebut demikian? Sebab, manusia pada dasarnya selalu berusaha memperoleh sesuatu yang dikehendakinya. Jika ingin dimaknai secara lebih dalam, usaha untuk mencapai kehendak tersebut mengkristal dalam cara bertindak dan cara berpikir.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Secara konseptual, pemaknaan politik mengalami

perkembangan. Ada lima konsep pemahaman dasar politik yang berkembang dan dikemukakan oleh para ahli. *Pertama*, konsep teori klasik oleh Aristoteles. Pada pandangan ini, politik diidentikkan dengan usaha untuk mencapai kebaikan bersama. Kebaikan bersama adalah entitas yang memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan individu. Kebaikan bersama itu adalah nilai keadilan, kebenaran dan kebahagiaan. *Kedua*, konsep teori kelembagaan disampaikan oleh Max Weber. Menurutnya, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang formal yuridis. *Ketiga*, konsep teori kekuasaan, disampaikan oleh Robson. Ia menyebutkan politik sebagai kegiatan mencari, mempertahankan kekuasaan, atau menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan sendiri dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain,

baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi. *Keempat*, konsep teori fungsionalisme. Melalui teori ini, David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. David memahami politik sebagai pembagian peran dan fungsi dalam menjalankan suatu otoritas di sebuah wilayah negara. *Kelima*, konsep pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk saling memengaruhi satu dengan lainnya dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Perkembangan konsep itu memperlihatkan bahwa politik semakin lama semakin dipahami sebagai entitas yang berkorelasi dengan kekuasaan dan pemerintahan.

Politik menjadi entitas yang *an sich* melekat dalam diri setiap orang. Kelekatan ini perlu dibarengi dengan cara pandang yang benar terhadap politik itu sendiri. Mengembalikan pandangan yang murni tentang politik ke ranah yang benar, menjadi tidak mudah untuk saat ini mengingat telah terjadi hingar bingar perpolitikan pada ranah negara, terutama menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2019. Menjadi penting bagi sekolah, sebagai sebuah lembaga politik tingkat dua setelah keluarga, untuk mengembalikan kembali makna yang benar tentang politik. Pendidikan politik perlu dikenalkan lebih dini di sekolah. Sebab, politik adalah entitas dasar setiap manusia.

### **Memurnikan Kembali Makna Politik**

Politik (harusnya) hadir sebagai entitas yang membebaskan masyarakat dari kehidupan yang buruk. Politik adalah kesempatan bagi setiap orang untuk membaktikan dirinya bagi masyarakat. Secara konkret dalam hidup bernegara, jalur politik yang benar dapat diisi dengan membuat regulasi bersama yang tersistem dan yang mendahulukan kepentingan umum. Namun, sayangnya, dunia politik justru cenderung menjadi hingar bingar. Hingar bingar dunia politik itu membuat sebagian besar orang keliru dan tersesat dalam memaknai politik. Hingar bingar tersebut

muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kegagalan setiap pelaku politik dalam memaknai perbedaan cara pandang dan cara paham tentang politik. Standar kebenaran tercipta berdasarkan standar pribadi dan kelompok. Dalam bahasa yang lain, sesuatu menjadi kebenaran mutlak ketika hal itu menguntungkan pribadi atau kelompok. Kosakata dalam dunia politik cenderung dipadupadankan dengan kata sifat “kotor”, “palsu”, atau “buruk”. Parahnya, politik dikaitkan erat dengan mental koruptif. Banyak orang baik enggan untuk berpolitik, karena takut tertular penyakit koruptif. Sebaliknya, orang bermental koruptif cenderung bersemangat dalam berpolitik karena bisa menjadi jalan tol mereka menuju kekayaan.

Pandangan apriori yang buruk terhadap politik, menjadi cacat pusaka dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Mengapa? Sebab, ketika politik dilihat kotor, maka sang manusia itu melihat kotor dirinya. Karena bagaimanapun, politik adalah entitas dasar yang melekat dalam diri manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak memiliki cita-cita. Karena itu, sesungguhnya setiap manusia akan berpolitik selama ia mengejar dan mewujudkan cita-citanya tersebut. Tidak ada jalan lain saat ini selain mengembalikan kembali makna politik pada jalurnya yang benar. Pendidikan

Sekolah adalah tempat yang tepat untuk mengusahakan hal tersebut.

### **Politik Itu Bukan Pokoknya, Tapi Baiknya**

Politik bukanlah memaksakan kehendak atau memaksakan cara pandang. Politik adalah jalan untuk melihat makna perbedaan. Adalah hal yang mustahil ketika memimpikan semua orang di dunia ini memiliki kesamaan yang absolut dalam kata, tindakan, dan cara pandang. Perbedaan itu sifatnya absolut dan tak terhindarkan. Perbedaan cara pandang ini lebih merujuk pada perbedaan arah dimulainya seseorang dalam melihat sesuatu. Sebuah benda yang berbentuk bulat akan tetap bulat meskipun dilihat dari arah atas, bawah, kanan ataupun kiri.

Tantangan dalam menghadapi perbedaan ada pada upaya setiap orang untuk tidak membiarkan absolutitas perbedaan melahirkan konflik besar. Konflik itu dapat terelakkan manakala setiap orang mampu memiliki cara pandang yang benar terhadap perbedaan. Kebenaran cara pandang pertama-tama harus berdiri pada nilai kebaikan itu sendiri. Jika berbicara tentang kebenaran dan kebaikan, ke manakah orang harus bermuara? Jawabannya adalah Tuhan. Setiap individu, terlebih mereka yang memutuskan terjun ke dunia politik, harus memiliki kedekatan personal dengan

Tuhan dan mengkristalkan kedekatannya itu dalam tutur kata dan sikap nyata yang tulus. Kedekatan personal dengan Sang Pencipta akan membentuk prinsip berpikir yang benar bahwa sesuatu yang baik pada dasarnya adalah baik. Sebaliknya, sesuatu yang buruk tidak akan pernah disebut baik.

Tidak ada ruang abu-abu yang diciptakan dalam menentukan kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Berkaca pada filsafat moral Immanuel Kant, sebuah tindakan yang diambil harus memperhatikan prinsip moral. Prinsip itu adalah prinsip *Imperatif-Kategoris* yang menuntut seseorang untuk menghormati kemanusiaan dalam dirinya sendiri dan orang lain, dimana seseorang tidak membuat pengecualian untuk keuntungan dirinya sendiri ketika bertindak. Prinsip itu menegaskan bahwa sebuah tindakan harus didasarkan pada aturan yang setiap orang mampu melakukan dan seharusnya mematuhi.

Dalam konteks ini, berpolitik yang benar adalah berpolitik secara bertanggung jawab. Dalam berhadapan dengan perbedaan, sebuah sikap politik dikatakan benar bila ia mampu memberikan ruang toleransi bagi setiap orang untuk mengembangkan cara pandangnya terhadap sebuah realitas. Tidak ada sekat-sekat dalam ruang toleransi ini, tapi juga bukan berarti tak ada dinding yang membungkusnya. Tetap harus

ada bungkus yang melingkupi ruang toleransi itu, yaitu dinding aturan dan prinsip moral yang menyentuh kepentingan semua pihak. Politik yang benar adalah membiarkan setiap orang melihat suatu kebenaran dari arahnya masing-masing selama tidak menghilangkan esensi kebenaran realitas yang dilihatnya.

Dalam konteks pendidikan sekolah, nilai-nilai politik dapat ditanamkan melalui kegiatan diskusi ataupun debat. Kegiatan diskusi terhadap sebuah realitas konkret adalah cara yang tepat untuk menunjukkan bahwa perbedaan adalah absolut ada dan tidak bisa disatukan. Lewat diskusi / debat, segala ide akan muncul dan mengalir mengikuti alur dialogis para peserta. Dalam proses dialogis itulah, setiap anak akan belajar untuk menemukan jalan tengah dari sebuah permasalahan/realitas yang diangkat. Tentu saja, untuk menciptakan jalan tengah yang solutif itu, setiap anak harus mengorbankan ego pribadinya untuk bisa mencapai sebuah kesepakatan bersama. Ada irisan kesamaan yang tetap dimunculkan dalam proses menghargai perbedaan itu.

Dalam proses untuk mencapai ke sana, perlu ditumbuhkan sikap kritis yang benar. Sikap kritis ini adalah kelanjutan dari rasa ingin tahu anak yang “tidak dimatikan.” Pendidikan pada kelas-kelas usia kecil (TK dan

SD) harus lebih mengutamakan pengembangan rasa keingintahuan anak daripada mengejar target materi kurikulum. Bukan rahasia lagi bahwa pendidikan di negeri ini cenderung mematikan rasa ingin tahu anak. Contoh nyata yang sering ditemui adalah masih banyaknya pengajar yang “mendiskreditkan” murid-murid yang senang bertanya. Bahkan, kalau ditarik mundur ke ranah keluarga, masih banyak orang tua yang lebih memilih untuk marah saat sang anak mempertanyakan banyak hal. Bagi kebanyakan orang tua, anak yang banyak bertanya adalah beban yang merepotkan dan menyita banyak waktu. Alur itulah yang membuat anak tidak lagi mau bertanya dan hanya menjadi “zombie-zombie” yang hanya menelan bahan ajar tanpa mengolah itu dalam dunia cerna otak serta hati mereka. Jadilah, sikap kritis itu hilang. Terbukti, problem masyarakat yang kini dihadapi Indonesia adalah penyebaran berita *hoax*. Mengapa *hoax* menjadi begitu subur di Indonesia? Hal ini karena penggunaan teknologi tidak dibarengi dengan budaya kritis yang kuat dalam masyarakat. Realitas inilah yang suka mengaburkan standar kebenaran umum.

Sekolah perlu menghidupkan kembali budaya kritis itu. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan studi media. Kini, hampir setiap anak

memiliki perangkat *gadget* pribadi untuk mengakses informasi dunia. Dari sana, sekolah bisa masuk dengan mengajak mereka setiap harinya melihat berita-berita viral untuk kemudian ditanggapi oleh mereka. Dalam pelajaran Bahasa, IPS ataupun PPKN, para siswa perlu diajak untuk secara rutin membuat laporan berita setiap minggunya terhadap apa yang mereka baca. Dalam laporan itu, setiap anak diajak untuk menyimak, menyelami, menanggapi hingga akhirnya memutuskan kebenaran berita itu. Ketika mereka bisa memutuskan kebenaran sebuah berita, pada titik itulah menjadi tanda akan klimaksnya sikap kritis mereka.

Menyikapi perbedaan secara benar dan kritis adalah syarat pertama bagi setiap orang untuk dapat berpolitik secara benar. Memberikan ruang toleransi bagi setiap orang untuk melihat kebenaran realitas yang sama dari arahnya masing-masing, adalah upaya untuk memperkaya pemaknaan nilai kebenaran dan kebaikan bersama. Dengan begitu, pada akhirnya, setiap orang dapat mencapai tujuannya masing-masing tanpa harus mengorbankan orang lain. Itulah makna politik yang pertama.

### **Politik itu Menang Tanpa Merendahkan dan Kalah Tanpa Merasa Terhina**

Selama ini, politik dinilai kotor karena menyisakan sakit hati dan dendam. Rasa sakit hati

dan dendam tersebut menjadi produk dari banalitas proses yang dijalankan para pencari kekuasaan. Dalam ranah yang lebih besar, politik selalu diidentikkan dengan kekuasaan. Sebab, memang jika ditarik dari akar katanya, kata politik sendiri berasal dari kata polis yang berarti negara atau kota. Tidak heran bila perkembangan ilmu pengetahuan mendefinisikan politik sebagai ilmu yang mengatur pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat.

Sah-sah saja apabila politik diidentikkan dengan kekuasaan. Namun, perlu diingat bahwa dalam teori klasik Aristoteles, disebutkan bahwa proses dalam politik itu harus tetap berujung pada upaya mewujudkan nilai kebaikan bersama (*bonum commune*). Pada kenyataannya, proses dalam politik itu hanya berhenti pada pembentukan dan pembagian kekuasaan semata saja tanpa berlanjut pada upaya mewujudkan kebaikan bersama. Kebaikan bersama yang dimaksudkan adalah kebaikan yang melingkupi seluruh pelaku politik. Jika dianalogikan dalam proses pembentukan kekuasaan, kebaikan bersama ini mencakup pihak pemerintah ataupun oposisi. Repotnya, setiap kali hajatan pemilu selesai, jarak yang tercipta karena adanya persaingan itu, tak dapat ditambah oleh semangat politik untuk menciptakan kebaikan bersama itu. Kenyataan itu

memperlihatkan bahwa masyarakat kita belum mampu memaknai kemenangan dan kekalahan secara benar. Bahasa ringkasnya, belum siap menang dan belum siap kalah.

Belajar menyikapi kemenangan dan kekalahan secara benar adalah inti kedua dari berpolitik. Kemenangan dan kekalahan adalah entitas absolut yang ada dalam setiap usaha manusia dalam meraih cita-cita atau kehendaknya. Dalam konteks persaingan, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang mutlak terjadi. Namun, memiliki sikap yang benar sebagai pemenang, belum tentu ada pada diri setiap orang. Mengutip dari falsafah Jawa yang berbunyi "*Ngluruk tanpo bolo, Menang tanpo ngasorake, Sekti tanpo aji-aji, Sugih tanpo bondho*", kita bisa melihat bahwa sikap pemenang yang sejati adalah tidak merendahkan orang lain.

Rasa sakit hati ataupun dendam yang tersisa dari proses kontenstasi politik, adalah produk dari pemahaman yang salah tentang menang dan kalah. Pada titik ini, sekolah sebagai sebuah "lembaga politik" tingkat dua, perlu memperkenalkan pengalaman menang dan kalah itu dalam diri setiap peserta didik. Tidak hanya memperkenalkan saja, tapi juga mengajak setiap anak untuk bersimpati pada pemenang dan berempati pada yang kalah.

Proses belajar berpolitik pada sisi ini, dapat dilakukan lewat cara-cara berikut.

- a. Kegiatan-kegiatan kompetisi, baik internal ataupun eksternal. Sebaiknya mungkin, sekolah perlu melibatkan para siswanya untuk mengikuti kompetisi atau bahkan sekolah mengadakan perlombaan untuk para siswanya. Diharapkan lewat kegiatan kompetisi ini, siswa dapat mengenal rasanya menjadi pemenang ataupun menjadi pihak yang kalah.
- b. Untuk jenjang sekolah yang lebih tinggi, kegiatan PEMILU OSIS menjadi langkah tepat selanjutnya untuk dijalankan. Melalui kegiatan ini, setiap anak akan belajar untuk berkontestasi politik seperti halnya pada tingkat negara. Rangkaian pemilu OSIS dibuat dalam berbagai tahapan yang meliputi kampanye visi misi, *talent show* peserta pemilu, dan pencoblosan surat suara. Di sini, pengalaman menang-kalah akan sangat begitu terasa. Sekolah perlu menunjukkan kepada para kontestan bahwa mereka adalah tim yang nantinya akan bekerja bersama. Untuk itu, kekalahan tidak membuat kontestan menutup diri. Begitu juga dengan sang pemenang. Ia akan mau membuka pintu bagi pesaingnya yang kalah untuk masuk ke dalam tim kepengurusan inti OSIS.
- c. Untuk memahami politik secara benar, perlu

dibangun kesadaran awal dalam diri setiap anak bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dan karenanya harus memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan di sekitarnya tanpa mengharapkan imbalan. Pada konteks ini, sekolah bisa mengusahakan program sosial yang nyata, seperti *Community Care Project*. Melalui program ini, setiap anak dapat diminta untuk mengisi sebagian masa liburan sekolahnya untuk memberikan aksi nyata yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, menggantikan peran para asisten rumah tangga dengan mengerjakan tugas rutin mereka; ikut membantu berjualan sayur bersama pedagang sayur keliling yang sudah dikenal; “bekerja sosial” di panti jompo atau panti sosial; atau bisa juga dengan mencuci mobil gratis milik tetangganya; atau ikut terlibat dalam kegiatan ronda malam rutin. Intinya, setiap pekerjaan nyata yang dilakukan itu mampu memberikan efek bahagia yang nyata bagi orang-orang yang dibantunya.

## Penutup

Bukan saatnya lagi bagi setiap insan pendidik untuk merasa tabu dengan peran baru

sekolah sebagai tempat untuk belajar berpolitik. Sekolah adalah “lembaga politik” tingkat dua setelah keluarga. Sebelum setiap anak benar-benar masuk dalam lembaga politik tingkat tiga, yaitu negara, mereka perlu diperkenalkan prinsip-prinsip berpolitik di sekolah. Dalam sekolah, setiap anak mulai mengenal sistem hirarki yang formal, komunikasi dialogis dalam komunitas kelas, dan konsep aturan serta sanksi. Sistem hirarki formal dikenal seiring mereka mengenal pola komunikasi dalam komunitas, yaitu kelas. Partner komunikasi mereka tidak lagi sebatas keluarga tapi juga orang lain dari luar keluarga. Di situ, terdapat tarik ulur kepentingan yang mulai dirasakan oleh mereka. Melalui proses tarik ulur kepentingan ini, mereka mulai mengenal yang namanya konsep “perbedaan paham/ide”. Di sinilah, mereka menjadi mengerti bahwa mereka memerlukan “penengah” dari setiap perbedaan yang muncul. Dari situlah, mereka akan memahami fungsi dan makna hirarki dalam sebuah komunitas.

Pendidikan politik di sekolah perlu dilakukan secara praktikal. Upaya sekolah untuk memperkenalkan politik pada hakekatnya adalah upaya sekolah untuk mengajar setiap anak menakar rasa dan rasio dalam menentukan sebuah pilihan bebasnya. Inilah pertama kali bagi setiap anak

untuk memilih tanpa ada intervensi dari orang tuanya. Pilihan bebas yang dijatuhkan murni berdasarkan hasil olah rasa dan rasio anak tersebut terhadap figur-figur yang terpilih. Keseimbangan olah rasa dan rasio inilah yang menjadi kunci sekaligus tujuan pembelajaran politik di sekolah. Semoga sekolah bisa menghasilkan manusia-

manusia politik yang “Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih Tanpo Bondho.” (Berjuang tanpa perlu membawa massa; Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan; Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan atau kekayaan; Kaya tanpa didasari kebendaan.) Semoga!

## Daftar Pustaka

- Driyarkara. 2006. *Karya lengkap driyarkara (ed. A.Sudiarja, SJ, Budi Subanar, SJ, St.Sunardi, T.Sarkim)*. Jakarta: Gramedia
- Surbakti, R. 1992. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo